



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 462/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DALAM WILAYAH
KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG




BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengajuan pengunduran diri Sdr. Fajeri Elmi Elyadi, S.Pd. sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ampukung Kecamatan Kelua Periode 2020 sampai dengan 2028 pada tanggal 15 Juli 2025, maka yang bersangkutan perlu diberhentikan dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ampukung Kecamatan Kelua, sehingga terjadi kekosongan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ampukung Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Ampukung pada tanggal 28 Juli 2025 telah sepakat mengusulkan Sdr. Bahrul Ilmi, S.Pd.I. sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu dan berdasarkan Surat Usulan Camat Kelua Nomor B-82/CK/100.2.1/08/2025, tanggal 11 Agustus 2025, perihal Usulan Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota BPD Ampukung dan Usulan Pengangkatan Anggota BPD Pengganti Antar Waktu sehingga perlu menerbitkan Keputusan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :
 Nama : Fajeri Elmi Elyadi, S.Pd
 TTL : 
 Pendidikan : 
 Alamat : 

Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ampukung Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

KEDUA : Mengangkat:
 Anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil Musyawarah
 Penetapan Anggota BPD tingkat Desa di Wilayah Kecamatan
 Kelua Kabupaten Tabalong :

Nama : Bahrul Ilmi, S.Pd.I
 TTL : 
 Pendidikan : 
 Alamat : 

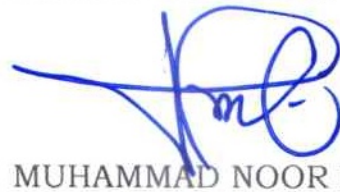
Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Ampukung Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu akan berakhir pada tanggal 26 Juni 2028.

Ditetapkan di Tanjung
 pada tanggal 18 November 2025.

PARAF HIERARKI		PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN		SEKDA	
KABID/KABAG		ASISTEN	
KASU/KASUBBID/KASUBBAG/JF		KADIS KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Camat Kelua di Kelua.
2. Kepala Desa Ampukung di Ampukung.
3. Ketua BPD Ampukung di Ampukung.
4. Yang bersangkutan.